PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jati No. 1 Gunung Bale Telp.(0457) 72202-72201 Fax. 72211

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 188.45/0559/Bag. Hukum/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI PRODUK HUKUM DAERAH BERSIFAT PENETAPAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa penyusunan operasional prosedur merupakan salah satu aspek penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang memiliki peran untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif, dan konsisten dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Produk Hukum Daerah Bersifat Penetapan demi terwujudnya pelayanan pemerintahan yang optimal;

c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur serta demi tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu dibentuk tim penyusun;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala tentang Pembentukan Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan administrasi produk hukum daerah bersifat penetapan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
2. Peraturan Bupati Donggala Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 852)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Produk Hukum Daerah Bersifat Penetapan dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pengarah

Memberikan petunjuk dan arahan mengenai pelaksanaan tugas Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Produk Hukum Daerah Bersifat Penetapan.

b. Ketua

1. Memastikan pelaksanaan tugas tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Produk Hukum Daerah Bersifat Penetapan Bagian Hukum berjalan Optimal;
2. Melaksanakan pengawasan tugas penyusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Produk Hukum Daerah Bersifat Penetapan.

c. Anggota

1. Merencanakan kegiatan teknis persiapan dan pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur;
2. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan teknis kegiatan Penyusunan dengan Ketua Tim;
3. Melaksanakan kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Pelayanan Administrasi Produk Hukum Daerah Bersifat Penetapan;
4. Melaksanakan administrasi pelaksanaan kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Produk Hukum Daerah Bersifat Penetapan; dan
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Produk Hukum Daerah Bersifat Penetapan kepada ketua TIM.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tim Penyusun Standa Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Produk Hukum Daerah Bersifat Penetapan bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 31 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,

Dr. Ir. RUSTAM EFENDI, S.Pd., SH., M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690929 199601 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 188.45/0559/Bag.Hukum/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI PRODUK HUKUM DAERAH BERSIFAT PENETAPAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI PRODUK HUKUM DAERAH BERSIFAT PENETAPAN

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA	Pengarah	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA	Ketua	
3.	Irmawati, S.H., M.H/ Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum dan HAM	Anggota	
4.	Reniati/ Pengelolah Data Informasi Hukum	Anggota	
5.	Agnes Oktaviani Putri, S.H/ Analis Advokasi Hukum	Anggota	
6.	Ajeng Aulia Rahmasari, S.H/ Analis Advokasi Hukum	Anggota	
7.	Ainun Nurjannah, S.H./ Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota	
8.	Arfandi Sanubari, S.H./ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	Anggota	
9.	Eko Wahyudianto, S.H/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	Anggota	
10.	Fulqil Qauli, S.H/Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota	
11.	Mafaati Hul Khair. M, S.H/ Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota	
12.	Siti Halija, S.H/ Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota	
13.	Sunaryo R. Nupura, S.H/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	Anggota	
14.	Arfandi/ Operator	Anggota	
15.	Arahman, S.H/ Tenaga Administrasi	Anggota	
16.	Intje Astuti/ Operator	Anggota	
17.	Ma'rifah, S.Sos/ Tenaga Administrasi	Anggota	
18.	Moh. Fathurrahman, S.H/ Tenaga Administrasi	Anggota	
19.	Nurhilal, S.H/ Tenaga Administrasi	Anggota	
20.	Tarmizi, S.Ap/ Operator	Anggota	

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,

PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA SEKRETARIAT DAERAH

Dr. Ir. RUSTAM EFENDI, S.Pd., SH., M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690929 199601 1 003